



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, AUDIT KINERJA, DAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT JAKARTA**

SKRIPSI

Rahmi Widyanti

1502015158

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2019



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, AUDIT KINERJA, DAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT JAKARTA**

SKRIPSI

Rahmi Widyanti

1502015158

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **“PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, AUDIT KINERJA, DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT”**

merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis orang lain, atau sebagian bahan pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber baik dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan. Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap dari karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 2019

Yang Menyatakan,



Rahmi Widyanti

NIM. 1502015158

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : **PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, AUDIT KINERJA DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

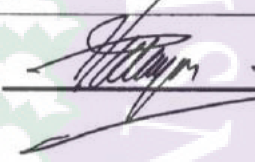

NAMA : **RAHMI WIDYANTI**

NIM : **1502015158**

PROGRAM STUDI : **S1 AKUNTANSI**


TAHUN AKADEMIK : **2019/2020**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi:

Pembimbing I	Dr. Nuzulul Hidayati, S.E., M.M., Ak., CA.	
Pembimbing II	Sumardi, S.E., M.Si.	

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA**


Sumardi, S.E., M.Si

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul:

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, AUDIT KINERJA, DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Yang disusun oleh :
Rahmi Widyanti
1502015158

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata-satu (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.

DR. HAMKA

Pada tanggal : 06 Desember 2019

Tim Penguji :

Ketua, merangkap anggota :

(Dr. Zulpahmi, SE., M.Si.)

Sekretaris, merangkap anggota :

(Mulyaning Wulan, S.E., M.Ak.)

Anggota:

(Dr. Hj. Nuzulul Hidayati, S.E., M.M., Ak., Ca.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Sumardi, S.E., M.Si

Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahmi Widyanti
NIM : 1502015158
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis karya : Skripsi

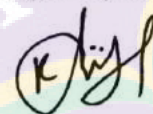
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, AUDIT KINERJA, DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal : 23 Oktober 2019
Yang menyatakan,



Rahmi Widyanti
NIM. 1502015158

ABSTRAK

Rahmi Widyanti (1502015158)

“PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, AUDIT KINERJA DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT”.

Skripsi. Program Srata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2019. Jakarta.

Kata kunci : *Good Governance*, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good governance*, audit kinerja dan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *good governance*, audit kinerja dan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel bebas dan akuntabilitas keuangan sebagai variabel terikat. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 67 data dengan menggunakan metode eksplanasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Metode penelitian yang digunakan untuk menguji pengaruh *good governance*, audit kinerja dan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan yaitu dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan melakukan uji t dan uji F, analisis akuntansi, analisis statistik, analisis koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis (t) secara parsial menunjukkan bahwa variabel *good governance* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan signifikan sebesar $0,045 < 0,05$, variabel audit kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan signifikan sebesar $0,002 < 0,05$, dan variabel Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh

signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Sedangkan *good governance*, audit kinerja dan standar akuntansi pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Besarnya nilai *Adjusted R Square* sebesar 46,6%.

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah seperti penyajian neraca daerah, penerapan akuntansi sektor publik, penyajian laporan daerah, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan agar dapat memberikan pengaruh yang lebih signifikan dan dapat memperluas penelitian di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar penelitian ini menjadi lebih komprehensif.

ABSTRACT

Rahmi Widyanti (1502015158)

"EFFECT OF GOOD GOVERNANCE, PERFORMANCE AUDIT AND ACCOUNTABILITY OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS FINANCIAL COMMUNICATIONS DIRECTORATE GENERAL OF THE SEA".

Essay. The Stratas Program Accounting Study Program. Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2019. Jakarta.

Keywords: Good Governance, Performance Audit and Government Accounting Standards on Financial Accountability.

This study aimed to determine the effect of good governance, performance audit and government accounting standards on financial accountability Director General of Sea Transportation. This study uses a qualitative method.

The variables studied in this research is good governance, performance audit and government accounting standards as the independent variable and financial accountability as the dependent variable. The sample in this study as many as 67 data by using explanation method. Data collection techniques in this study was a questionnaire. The method used to test the effect of good governance, performance audit and government accounting standards on financial accountability is by using multiple linear regression analysis by t test and F test, accounting analysis, statistical analysis, the analysis determination.

This research result indicates that the results of the hypothesis (t) on this fact shows that the good governance significant impact on financial accountability with significantly by $0,045 < 0,05$, the audit performance significant impact on financial accountability with significantly by $0,002 < 0,05$, government accounting standards and variable significant impact on financial accountability with significantly by $0,000 < 0,05$. Whereas good governance, performance and

audit government accounting standards simultaneously significant impact on financial accountability with the significance of $0,000 < 0,05$. The amount of adjusted r square of 46,6%.

It is expected that further research may add other variables that can affect the quality of government financial reports such as balance sheet presentation area, the implementation of public sector accounting, presentation of regional reports, accounting controls and reporting systems in order to give more influence significantly and expand research in the Directorate General of Sea Transportation order this becomes more comprehensive research.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam tidak lupa peneliti sampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti sangat berterima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak Sartam dan Ibu Supani, serta saudara saya yang tidak saya sebutkan satu-satu, yang telah memberikan semangat, pengertian, motivasi, dan doanya selama peneliti menyusun skripsi ini. Hal ini merupakan sebuah langkah awal bagi peneliti di dunia kerja dan bertujuan untuk memenuhi syarat perkuliahan.

Selama proses penyusunan skripsi ini, *Alhamdulillah* peneliti banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

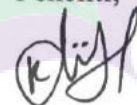
1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., MM., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin, S.H.I, M.Pd.I, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Sumardi, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Prof. DR. HAMKA sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan koreksi serta arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Dr. Nuzulul Hidayati, S.E., MM., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan koreksi serta arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama saya kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
9. Safitri Rahma Angraeni, Noneng Cunayah, Rekha Nanda Putri, Nur Wahidah, Siti Amaliah Karim, Siti Aan Nurhasanah, Nurul Sartika, Wiwik Oktaviyani, Rini Irianti, Fatimah Azzahra Tanjung, Radinka Kevan, Putri Anggraini Dewita Sari, Chairunnisa Woro Palupi, Mohammad Gian Yana dan Muhammad Iqbal Putra yang telah menemani, memberikan motivasi, dan bantuan lebih kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Semua teman-teman akuntansi angkatan 2015 FEB UHAMKA, yang telah memberikan semangat kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segalanya dengan kebaikan dan keridhoan-Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Atas kekurangan skripsi ini, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kemajuan peneliti dalam kegiatan selanjutnya. Demikian, peneliti berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, 23 Oktober 2019

Peneliti,



(Rahmi Widyanti)

NIM. 1502015158

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.2.1 <i>Identifikasi Masalah</i>	5
1.2.2 <i>Pembatasan Masalah</i>	5
1.2.3 <i>Perumusan Masalah</i>	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu	8
2.2 Telaah Pustaka	19
2.2.1 <i>Teori Keagenan (Agency Theory)</i>	19
2.2.2 <i>Akuntabilitas</i>	20
2.2.2.1 <i>Sifat Akuntabilitas</i>	21
2.2.2.2 <i>Ciri-ciri Pemerintahan yang Akuntabel</i>	24

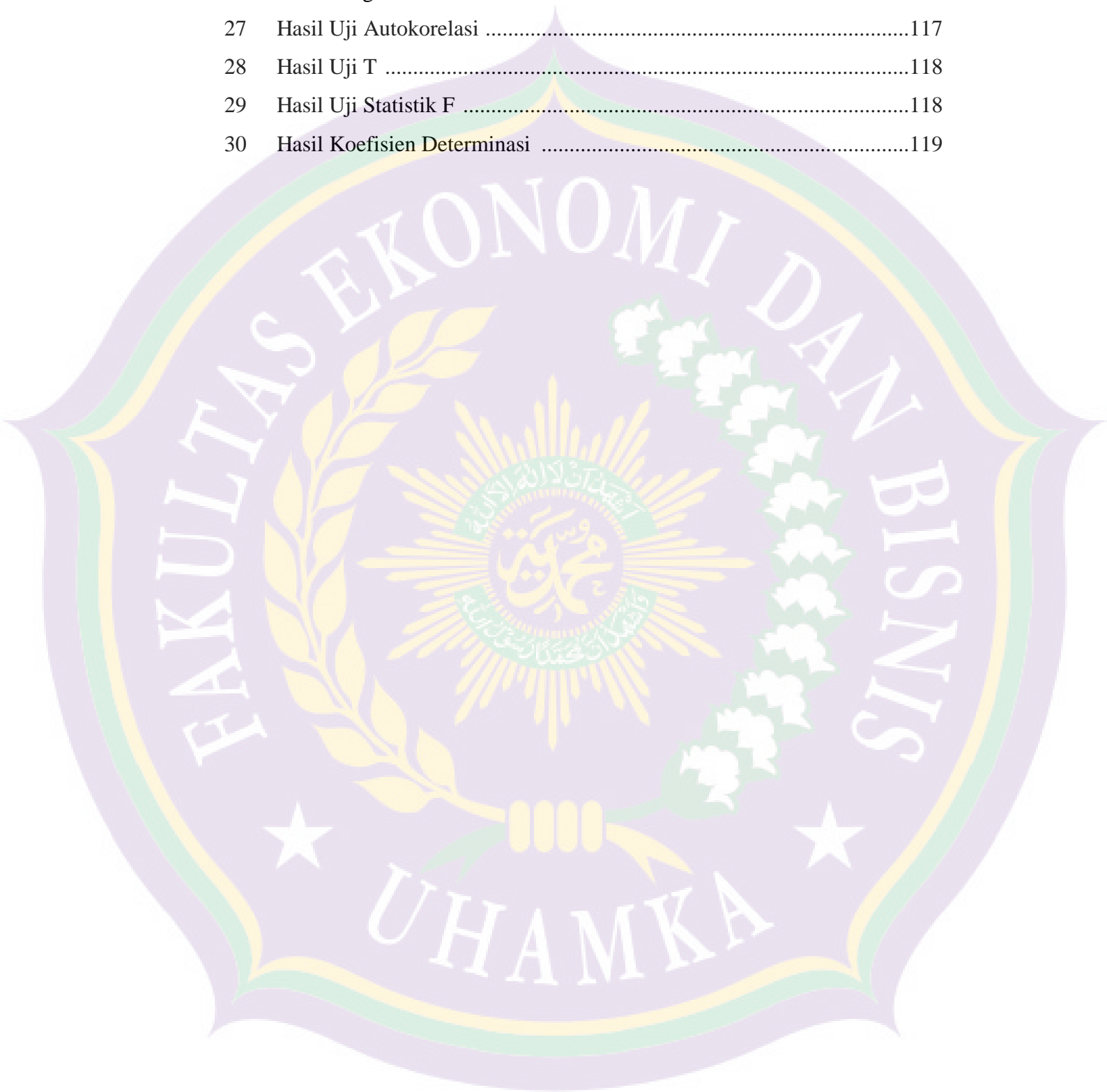
2.2.2.3	<i>Macam-macam Akuntabilitas</i>	24
2.2.3	<i>Good Governance</i>	25
2.2.3.1	<i>Ciri-ciri Good Governance</i>	26
2.2.3.2	<i>Prinsip-prinsip Good Governance</i>	26
2.2.4	<i>Audit Kinerja</i>	30
2.2.4.1	<i>Pedoman Audit Kinerja</i>	31
2.2.4.2	<i>Standar Audit Kinerja</i>	33
2.2.4.3	<i>Sistem Pengendalian Intern (SPI)</i>	37
2.2.5	<i>Standar Akuntansi Pemerintah</i>	39
2.2.5.1	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</i>	40
2.2.5.2	<i>Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual</i>	40
2.2.5.3	<i>Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan</i>	41
2.3	<i>Kerangka Pemikiran Teoritis</i>	44
2.4	<i>Rumusan Hipotesis</i>	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	<i>Metodologi Penelitian</i>	50
3.2	<i>Operasionalisasi Variabel</i>	50
3.3	<i>Populasi dan Sampel</i>	52
3.3.1	<i>Populasi</i>	52
3.3.2	<i>Sampel</i>	52
3.4	<i>Teknik Pengumpulan Data</i>	53
3.4.1	<i>Tempat dan Waktu Penelitian</i>	53
3.4.2	<i>Teknik Pengumpulan Data</i>	53
3.5	<i>Teknik Pengolahan dan Analisis Data</i>	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	<i>Gambaran Umum dan Objek Penelitian</i>	62
4.1.1	<i>Lokasi Penelitian</i>	62
4.1.2	<i>Sejarah Singkat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</i>	63
4.1.3	<i>Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</i>	64

4.2 Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan	65
4.2.1 Hasil Pengolahan data	65
4.2.1.1 Deskripsi Responden	65
4.2.2 Analisis Akuntansi	66
4.2.2.1 Frekuensi dan Jawaban Responden	67
4.2.2.2 Analisis Akuntansi	90
4.2.3 Analisis Statistik	106
4.2.4 Uji Kualitas Data	106
4.2.4.1 Hasil Uji Validitas Data	106
4.2.4.2 Hasil Uji Reabilitas Data	109
4.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda	111
4.2.6 Uji Asumsi Klasik	113
4.2.6.1 Uji Normalitas	113
4.2.6.2 Uji Multikolinieritas	114
4.2.6.3 Uji Heteroskedastisitas	115
4.2.6.4 Uji Autokorelasi	116
4.2.7 Uji Hipotesis	117
4.2.7.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)	117
4.2.7.2 Uji F	118
4.2.8 Analisis Koefisien Determinasi (R Square)	119
4.3 Interpretasi Hasil	120
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	123
5.2 Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126

DAFTAR TABEL

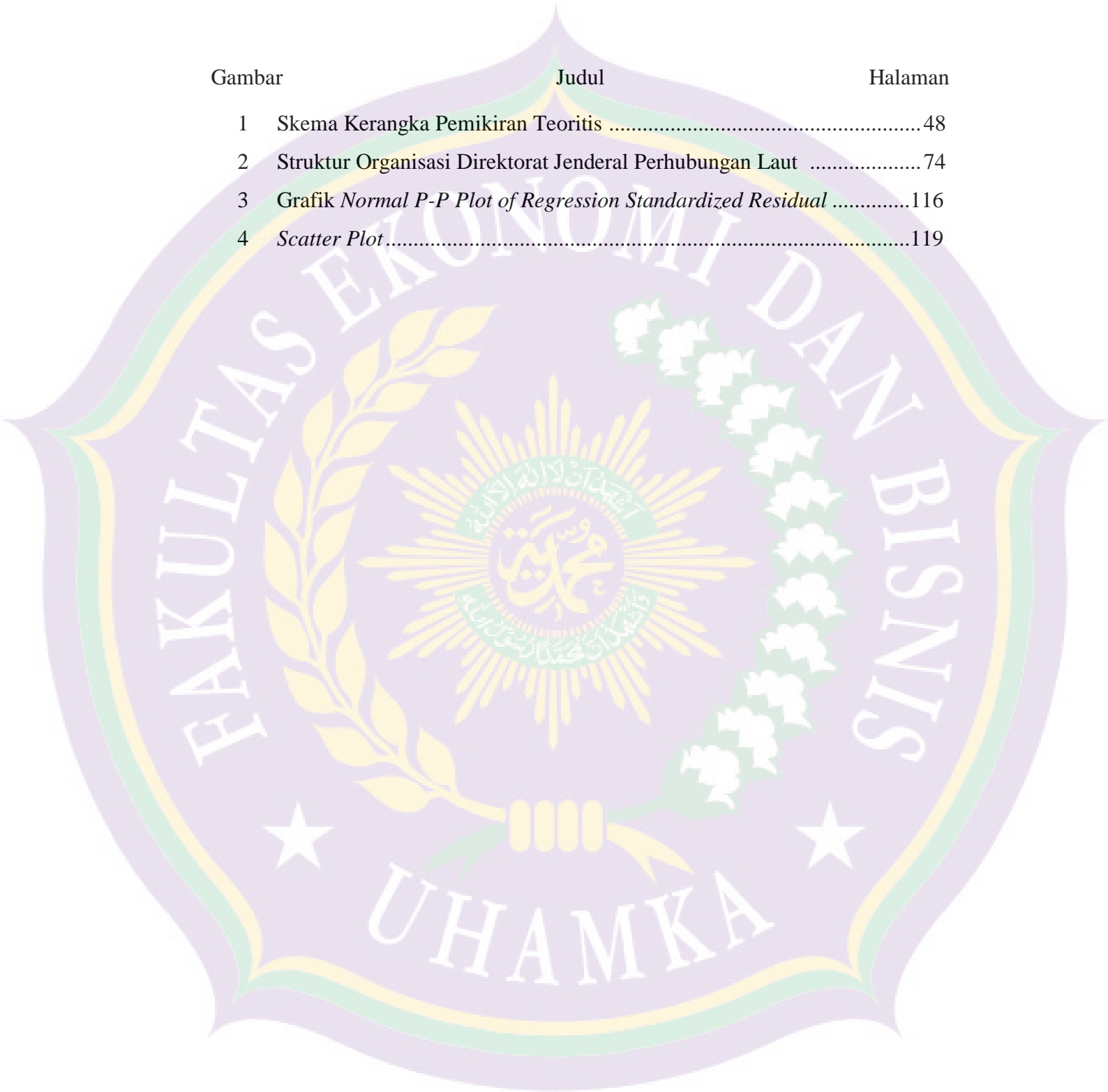
Nomor	Judul	Halaman
1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	13
2	Operasional dari Variabel Penelitian	51
3	Skala <i>Likert</i>	54
4	Posisi Koefisien <i>Durbin Watson</i>	60
5	Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	65
6	Profil Responden	66
7	Frekuensi dan Jawaban Responden Variabel <i>Good Governance</i>	67
8	Frekuensi dan Jawaban Responden Variabel Audit Kinerja	72
9	Frekuensi dan Jawaban Responden Variabel Standar Akuntansi Pemerintah	80
10	Frekuensi dan Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas Keuangan ...	85
11	Keterikatan <i>Good Governance</i> dan Akuntabilitas keuangan	91
12	Keterikatan Audit Kinerja dan Akuntabilitas keuangan	94
13	Keterikatan Standar Akuntansi Pemerintah dan Akuntabilitas keuangan	98
14	Keterikatan <i>Good Governance</i> , Audit Kinerja, Standar Akuntansi Pemerintah dan Akuntabilitas Keuangan	102
15	Hasil Uji Statistik Deskriptif	106
16	Hasil Uji Validitas Variabel <i>Good Governance</i>	107
17	Hasil Uji Validitas Variabel Audit Kinerja	108
18	Hasil Uji Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintah	108
19	Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Keuangan	109
20	Hasil Uji Reabilitas Variabel <i>Good Governance</i>	110
21	Hasil Uji Reabilitas Variabel Audit kinerja	110
22	Hasil Uji Reabilitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintah	110
23	Hasil Uji Reabilitas Variabel Akuntabilitas Keuangan	111
24	Hasil Pengolahan Data Regresi Linier Berganda	111
25	Hasil Uji Normalitas	114

26	Hasil Pengolahan Data Multikolinieritas	115
27	Hasil Uji Autokorelasi	117
28	Hasil Uji T	118
29	Hasil Uji Statistik F	118
30	Hasil Koefisien Determinasi	119



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis	48
2	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	74
3	Grafik <i>Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual</i>	116
4	<i>Scatter Plot</i>	119



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Kuesioner	1/32
2.	Surat Keterangan Riset.....	7/32
3.	Hasil Nilai Kuesioner	8/32
4.	Hasil Olah SPSS	16/32
5.	Tabel r	22/32
6.	Tabel t	23/32
7.	Tabel F.....	24/32
8.	Tabel <i>Durbin-Watson</i>	25/32
9.	Surat Tugas	26/32
10.	Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi	27/32
11.	Formulir Pengajuan Persetujuan Judul Proposal Skripsi	28/32
12.	Formulir Perubahan Judul	29/32
13.	Catatan Konsultasi Skripsi Pembimbing 1 (satu).....	30/32
14.	Catatan Konsultasi Skripsi Pembimbing 2 (dua)	31/32
15.	Daftar Riwayat Hidup	32/32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena akuntabilitas muncul pada awal reformasi sebagai dampak ketidakpuasan masyarakat akan ketidakmampuan pemerintah dalam menerapkan akuntabilitas secara konsisten. Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut pemerintah telah menerbitkan Inpres 7 Tahun 1999, dan paket perundangan pengelolaan keuangan negara yaitu UU 17 Tahun 2003 maupun UU 1 Tahun 2004 maupun peraturan perundangan turunannya.

Dilihat dari peraturan perundangan yang telah diterbitkan dapat dikelompokkan dalam tiga kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atau pertanggungjawaban. Peraturan yang diterbitkan untuk kegiatan perencanaan pembangunan nasional adalah UU 17 Tahun 2003, PP 20 Tahun 2004, PP 21 Tahun 2004, UU 25 Tahun 2006, PP 39 Tahun 2006, dan PP 40 Tahun 2006. Untuk pelaksanaan kegiatan mengacu pada UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, dan PP 80 Tahun 2008. Sedangkan untuk kegiatan pelaporan/pertanggungjawaban adalah Inpres 7 Tahun 1999, UU 17 Tahun 2003, PP 20 Tahun 2004, PP 21 Tahun 2004, PP 8 Tahun 2006, dan PP 39 Tahun 2006.

Hasil dari penelaahan peraturan tersebut yaitu, belum diaturnya metode pengintegrasian laporan keuangan dengan laporan kinerja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadikan akuntabilitas keuangan negara masih bersifat partial, belum tergambar nya hubungan pengukuran kinerja dan evaluasi yang dilakukan

berdasarkan Inpres 7 Tahun 1999 dengan pemantauan dan evaluasi berdasarkan PP 20/PP 21/PP 39, dan terdapat kerancuan kewenangan khususnya menyangkut instansi yang bertanggungjawab terhadap pengukuran kinerja (pemantauan, evaluasi), untuk kepentingan perencanaan, keputusan anggaran maupun pertanggungjawaban APBN/D.

Audit pada organisasi sektor publik tidak hanya mencakup audit atas laporan keuangan dan audit dengan tujuan tertentu, namun juga audit kinerja yang merupakan perluasan dari audit tersebut. Menurut Pasal 4 ayat 3 UU No. 15 Tahun 2004 audit kinerja merupakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomi, efisien, dan efektivitas. Dalam pelaksanaan audit diperlukan standar yang akan digunakan untuk menilai mutu pekerjaan audit yang dilakukan. Standar tersebut memuat persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Di Indonesia standar audit pemerintahan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007 dan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SPKN memuat persyaratan profesional auditor, mutu pelaksanaan audit dan persyaratan laporan audit yang profesional. Berdasarkan SPKN, dalam audit kinerja berlaku standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Berikut ini secara ringkas dari standar umum, standar pelaksanaan dan standar pelaporan dalam audit kinerja.

Menurut Fauzia Kartika Darmanto (2017) alasan pentingnya dilakukan audit kinerja adalah untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, selain itu audit

kinerja juga sebagai alat evaluasi dan pengarah dalam pengalokasian sumber dana masyarakat, karena dengan dilakukannya audit kinerja akan terwujud pengendalian terhadap kinerja dari pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan laporan keuangan yang dikeluarkan pemerintah. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Dengan dilakukannya audit kinerja akan terwujud pengendalian terhadap kinerja dari pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan laporan keuangan yang dikeluarkan pemerintah.

Untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel pemerintah dituntut menyusun serta menyajikan laporan keuangan publiknya sesuai pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam SAP No. 01 menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah. Semua informasi tersebut digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah ini merupakan pertanggung jawaban dari pemerintah terhadap masyarakatnya sebagai sumber dana.

Tujuan-tujuan itulah yang menyebabkan diperlukannya sebuah standar yang paling tidak harus dimiliki oleh laporan yang dibuat pemerintah, standar ini juga memuat pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Persyaratan minimum yang harus dipenuhi laporan keuangan

pemerintah paling tidak adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Adanya *research gap* dari penelitian terdahulu juga melatarbelakangi penelitian ini. Melalui penelitian Azlim dkk (2012) menyatakan bahwa ada pengaruh antara penerapan good governance dengan akuntabilitas keuangan. Lalu Ni Made Suratmi dkk (2014) menyatakan bahwa audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik hal ini berarti semakin baik audit kinerja, maka akan terjadi peningkatan kinerja pegawai dalam membuat atau menyusun laporan keuangannya. Selanjutnya penelitian dari Wayan Kusuma Wiraputra dkk (2014) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman SAP seorang pegawai, maka semakin tinggi tingkat penyusunan laporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Governance*, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.”**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimakaha pengaruh *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan?
2. Bagaimakah pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan?
3. Bagaimakah pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan?
4. Bagaimanakah pengaruh *Good Governance*, Audit Kinerja, dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai akuntansi atau bagian keuangan yang terkait dalam pengelolaan laporan keuangan kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Kementerian Negara Republik Indonesia.
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh *good governance*, audit internal dan sistem akuntansi pemerintah.
3. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Keuangan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tahun 2018.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

”Apakah pengaruh *Good Governance*, audit kinerja, dan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah Negara pada kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian serta memiliki konsistensi dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
2. Untuk mengetahui pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
3. Untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Good Governance*, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan terhadap Akuntabilitas Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini penulis berharap bahwa penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan terkait pengaruh *Good Governance*, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan dalam Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta penjelasan mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media, 195.
- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media, 195.
- Alex, G. (2014). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Surya Bangun Jaya Abadi (Terwaralaba Ray White)*. Agora Vol. 2, No. 2.
- Aliyah dan Nahar. (2012). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*. Jurnal Akuntansi & Auditing , 137-150.
- Amelia, Ira, Desmiyawati, dan Nur Azlina. (2014). *Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan)*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, Universitas Riau Pekanbaru, Vol 1(1), 1-15.
- Anantawikrama. (2013). *Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor, Independensi dan Pengalaman Auditor Terhadap Tanggung Jawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan dan Kekeliruan Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Bali)*. Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2. No.1.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta : Rineke Cipta.
- Azlim, Darwanis, dan Usman Abu Bakar (2012). *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh*. Jurnal Akuntansi No. 1 Vol. 1 Agustus 2012.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2007. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI No 1, Tahun 2007 tentang SPKN*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Basri, H., & Nabiha, A. S. (2016). *Accountability of local government: The case of Aceh Province, Indonesia*. Asia Pacific Journal of Accounting and Finance, 3(1).

- Cadbury Committee Report. (1992). *The Financial Aspects of Corporate Governance*. Gee and Co. Ltd. London
- Chi-Chi, O. A., & Ebimobowei, A. (2012). *Accountability and public sector financial management in Nigeria*. *Oman Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 34(953), 1-17.
- Darmanto, F. K., Nursiam, D., & Nursiam, M. H. (2017). *Pengaruh Penerapan Good Governance, Audit Kinerja Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Effendi, Rizal. (2013). *Accounting Principles 'Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP'*. Edisi Revisi Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Eivani, F., Nazari, K., & Emami, M. (2012). Public accountability and government financial reporting. *African Journal of Business Management*, 6(29), 8475-8482.
- Ekatama, N., & Haryanto, H. (2017). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Dnyani Nyoman, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Trisna Herawati. (2014). *Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor, Independensi, dan Pengalaman Auditor Terhadap Tanggung Jawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan dan Kekeliruan Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Bali)*. e-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI Volume 2. no.1.
- Ghozali, Imam (2013). *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS"*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery. (2014). *Accounting Principles*. PT Grasindo, Palmerah Barat , Jakarta.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Available from: <http://papers.ssrn.com>
- K.R. Subramanyam dan John J. Wild. (2014). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Sepuluh*. Jakarta: Salemba Empat.

- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istitut Pemerintah.*Lembaga Administrasi Negar (LAN) RI.
- Mahmudi, (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmud, S., Mahsuni, A. W., & Junaidi, J. (2017). "*Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating*"(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Malang). *Jurnal Riset Akuntansi*, 6(10).
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mustafa, D. (2013). *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- M. Reeve, James. S. Warren, Carl. et.al. (2014). *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nahar, Aliyah. (2012). "*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Jepara,*" *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8/No.2:97-189.Hlm.137-150.
- Ni Made Suratmi, dkk. (2014). *Pengaruh Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik*. *Universitas Pendidikan Ganesha*. Jurnal Volume 2 No. 1 Tahun 2014. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurlaili (2016). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Skpd Kabupaten Bengkalis)*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 3(1), 449-461.
- Rasul, Agung Abdul. (2013). *Ekonometrika (Formula dan Aplikasi dalam Manajemen)*. Mitra Wacana Media, Jakarta
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rinaldi, R. R., & Akt, C. A. (2016). *Pengaruh Penerapan Good Governance, Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Rohmawati, I., & Adi, S. W. (2016). *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Rudianto. (2012). *Pengantar akuntansi (konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan)*. Jakarta : Erlangga.

Sande, Peggy. (2013). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Universitas Negeri Padang.

Santoso, Singgih. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Salamah, U., Kamaliah, K., & Safitri, D. (2018). *Pengaruh Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak)*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 4(2), 1-15.

Sekaran, U. (2014). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Setyaningsih, Theresia Martha. (2014). *Pengaruh Mekanisme Internal Corporate Governance Terhadap Biaya Agensi*. Universitas Bengkulu.

Sugiarti, Ayu. (2012). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya*. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmawati, A. (2013). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Universitas Jambi.

Tim Penyusun. (2014). *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Udiyanti, Atmadja, dan Darmawan. (2014). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Potensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *E-Journal S1 Ak*, Vol 2. No. 1. Universitas Pendidikan Ganesha

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang Pasal 23 Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Pasal 57 Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Wiraputra, Wayan Kusuma, Sinarwati, Ni Kadek, Nyoman Trisna Herwati, (2014). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Klungkung)*. *E-jurnal S1 Ak*, Volume 2, Nomor 1. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.

Zahrani, Farah Dhiya. (2016). *Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada CPDP Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan)*. Universitas Widyatama.

Sumber lain:

www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/968/09.819-Akuntabilitas-Kuangan-Negara-Konsep-dan-Praktik-di-Indonesia, diakses 20 Juli 2019

www.dephub.go.id/org/djpl/sejarah, diakses 5 Agustus 2019

www.jakarta.go.id, diakses 15 Juni 2019